

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pada penghujung penelitian ini dapat diambil sebuah garis besar bahwa pengambilan suatu kebijakan oleh sebuah negara memang didasari oleh pentingnya keamanan nasional mereka. Bentuk pengambilan sebuah sikap tentu tidak terlepas dari sikap alamiah manusia terkait sikap percaya dan tingkat sekuritisasi, yang mana jika ditarik pada konteks penelitian ini maka kesamaan pada identitas yang dijadikan sebagai acuan. Bentuk kesamaan identitas sosial mendorong adanya tingkat kepercayaan dan rasa aman, dengan kata lain jika seseorang memiliki karakteristik identitas sosial yang mirip bahkan serupa atau sama akan lebih meningkatkan rasa kepercayaan atau berbanding lurus pada kadar tersebut. Jika ditarik pada ranah hubungan perpolitikan sebuah negara, adanya pengaruh identitas sosial kerap kali terdapat pada proses pembuatan dan pengambilan suatu kebijakan serta bentuk adanya dorongan propaganda melalui media.

Pengaruh dari adanya suatu identitas sosial sangat berperan terhadap para pendatang yang notabene merupakan pembawa identitas minoritas pada suatu wilayah. Hal tersebut terlihat pada bagaimana masyarakat dengan identitas yang lebih dominan dalam bersikap atau memberikan respon atas keberadaan para pendatang tersebut. Seperti halnya pada masyarakat lokal dalam bersikap terhadap para pengungsi yang

memasuki wilayah Polandia. Didapati juga bahwa identitas sosial memiliki kesinambungan yang kuat terhadap keamanan nasional. Oleh karenanya tidak sedikit masyarakat lokal yang memilih untuk mengambil sikap lebih tertutup pada pengungsi atau orang asing dengan identitas yang jauh berbeda dengan mereka. Hal itu didasari oleh terciptanya sikap ketidaknyamanan dan ketidakamanan yang mereka rasakan melalui bentuk prasangka terlebih jika dalam masyarakat tersebut telah tertanam stigma buruk akan para pendatang atau pengungsi tersebut.

Jika kita telusuri lebih lanjut, pada pembahasan mengenai pengungsi tentu terdapat hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seluruh pengungsi yang ada pada suatu negara tanpa dibedakan dari pengungsi lain dikarena memiliki landasan hukum, hak-kewajiban negara penerima, dan tujuan yang sama. Namun nyatanya pada kasus pengungsi yang ada di Polandia, terdapat kesenjangan terhadap pengungsi Timur Tengah dan Afrika Utara serta pengungsi Ukraina. Bentuk diskriminasi tersebut sesuai kejadian lapangan terjadi pada ranah birokrasi pemerintah Polandia baik pada saat proses pengajuan izin masuk dan tinggal sementara sampai dengan penerimaan atau prosedur *screening*, namun juga di kalangan masyarakat Polandia yang kerap menyerukan menolak terhadap pengungsi non-Ukraina. Bentuk diskriminasi tersebut dilakukan atas dasar insekuritas dampak dari pergesekan antara identitas masyarakat lokal Polandia dan sosial-budaya yang dibawa oleh pengungsi non-Ukraina.

## **4.2 Saran**

Dalam sebuah penelitian tentu memiliki fokus tujuan yang berbeda-beda serta terdapat beberapa aspek yang kurang terjangkau atau terbahas. Oleh karenanya tentu dalam perumusan penelitian ini penulis menemukan beberapa aspek yang dirasa kurang mengenai topik yang menjadi bahasan. Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian lanjutan terkait topik pengungsi pada negara-negara di Eropa Tengah terlebih Polandia adalah sumber-sumber yang dapat dibilang masih belum banyak beredar. Tentu dalam melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder akan menjadi sebuah tantangan tersendiri terlebih dalam mencari data domestik negara tersebut yang dikarenakan data yang beredar atau tersaji mayoritas menggunakan bahasa lokal negara tersebut dan dapat dibilang tidak banyak data tersaji dalam bahasa Inggris terkait data aktual terkini. Serta penulis memberikan adanya saran bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengulik terhadap aspek ekonomi yang dapat terbilang kurang terjangkau dikarenakan cakupan yang bersinggungan dengan pengungsi korban ekonomi atau migran yang mencari lapangan kerja.